LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Contoh format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

PERAT	URAN DE	SA	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
NOM	IOR	TAI	HUN	•••••

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun perencanaan pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12.	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012
	tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
	dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
	Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13.	Dst
	Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PE	RMUSYAWARATAN DESA
	TO A NI
	DAN
	KEPALA DESA
	MEMUTUSKAN:
n : PER	RATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN
PEN	IDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah adalah desa

Menetapkan:

- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa

- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
- 7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
- 8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- 9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 14. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.

1	5	Dst											
1	U .	レン	 	 	 	 	•		 	•	٠	•	

BAB II

AZAS

Pasal 2

- (1) Pengelolaan APBDes berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Jangka waktu APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

BAB III

ANGGARAN DESA

Pasal 3

Ang	ggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
1.	Pendapatan Desa sejumlah Rp terdiri dari:
	a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp
	b. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp
	c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
	Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah
	Rp
	d. Hibah dan sumbangan sejumlah Rp
2.	Belanja Desa sejumlah Rp terdiri dari:
	a. Belanja Langsung sejumlah Rp
	b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp
3.	Pembiayaan sejumlah Rp terdiri dari
	a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp
	b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp

4. Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 4

	Peratur	an Desa ir	ni mulai be	erlaku sejak tanggal	1 Januari
	Agar	setiap	orang	mengetahuinya,	memerintahkan
	pengun	dangan Pe	eraturan D	esa ini dengan pene	mpatannya dalam
	Berita I	Daerah De	sa		
				Ditetapkan di .	
				pada tanggal	
				KEPALA DESA	
Diundangkar	n di	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••		
pada tanggal	•••••	•••••	•••••		
SEKRETARIS	S DESA				
	•••••		•		
BERITA DES				KABUPATE	
	TAH	UN	N	IOMOR	

LAMPIRAN : PERATURAN DE	ESA
NOMOR	TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJALAN	KET./ SUMBER DANA
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa			
1.1.1.2	Hasil Kerjasama			
1.1.1.3	Lumbung Desa			
	Dst			
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Desa			
1.1.2.2	Tanah bukan milik Desa			
	yang dikuasai dan/ atau			
	dimanfaatkan			
	pengelolaannya Desa			
1.1.2.3	Pasar Desa			
1.1.2.4	Bangunan milik Desa			
1.1.2.5	Obyek wisata/rekreasi			
	milik Desa			
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan			
	yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Hutan Desa			
1.1.2.8	Jalan Desa			
1.1.2.9	Lapangan Desa			
1.1.2.10	Lain-lain kekayaan milik			
	desa			
	Dst			
1.1.3	Pungutan Desa			
1.1.3.1	Biaya ganti cetak blangko			
1.1.3.2	Biaya legalisasi			
1.1.3.3	Dana pemeliharaan			
1.10.1	sarana/ prasarana Desa			
1.1.3.4	Dana pembangunan			
1.1.3.5	Pungutan atas jasa/			
	manfaat yang diberikan			
	oleh Desa			
	Dst			
1 1 4	TT			
1.1.4	Hasil Swadaya dan			
1 1 4 1	Partisipasi			
1.1.4.1	Hasil swadaya dan			
	partisipasi			

1.1.5 Hasil Gotong Royong 1.1.5.1 Hasil Gotong Royong Dst	
1.1.5 Hasil Gotong Royong 1.1.5.1 Hasil Gotong Royong Dst	
1.1.5.1 Hasil Gotong Royong Dst	
1.1.5.1 Hasil Gotong Royong Dst	
1.1.6 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.1.6.1 Jasa Giro dan pendapatan bunga 1.1.6.2 Tuntutan ganti rugi 1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
1.1.6 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.1.6.1 Jasa Giro dan pendapatan bunga 1.1.6.2 Tuntutan ganti rugi 1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
Asli Desa yang sah 1.1.6.1 Jasa Giro dan pendapatan bunga 1.1.6.2 Tuntutan ganti rugi 1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
Asli Desa yang sah 1.1.6.1 Jasa Giro dan pendapatan bunga 1.1.6.2 Tuntutan ganti rugi 1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
1.1.6.1 Jasa Giro dan pendapatan bunga 1.1.6.2 Tuntutan ganti rugi 1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
pendapatan bunga 1.1.6.2 Tuntutan ganti rugi 1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
1.1.6.2 Tuntutan ganti rugi 1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
1.1.6.3 Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa Dst	
barang/jasa oleh Desa Dst	
1.2 Dana Alokasi Desa (DAD) 1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah/Kabupaten 1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten	
1.2 Dana Alokasi Desa (DAD) 1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten 1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten	
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten 1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten	
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten 1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten	
Kabupaten 1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten	
1.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten	
Daerah/ Kabupaten	
1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)	
1.3 Bantuan Keuangan	
Pemerintah dan	
Pemerintah Daerah	
1.3.1 Bantuan Keuangan	
Pemerintah Pusat	
Dst	
1.3.2 Bantuan Keuangan	
Pemerintah Propinsi	
Dst	
100	
1.3.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	
1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa	
(TPAPD)	
1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan	
Badan Permusyawaratan	
Desa (BPD)	
1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat	
Pemerintah Desa	
Karangkopek	
1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat	
Pemerintah Desa	
Karangkopek	
Dst	

1.4	TT** 1 1 1 .		
1.4	Hibah dan sumbangan		
	dari pihak ketiga yang		
	tidak mengikat		
1.4.1	Hibah dan sumbangan		
1.10	dari pemerintah		
1.4.2	Hibah dan sumbangan		
	dari pemerintah propinsi		
1.4.3	Hibah dan sumbangan		
	dari pemerintah		
	kabupaten		
1.4.4	Hibah dan sumbangan		
	dari badan/lembaga/		
	organisasi swasta		
1.4.5	Hibah dan sumbangan		
	dari kelompok		
	masyarakat/ perorangan		
	Dst		
	II AII DDND AD AMASS		
JUM	ILAH PENDAPATAN		
	1	<u> </u>	
		<u> </u>	
2	BELANJA		1
0.1			
2.1	BELANJA LANGSUNG		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	Honorarium		
2.1.1.2	Uang Sidang		
2.1.1.3	Upah tenaga kerja		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		1
0.1.0.1			
2.1.2.1	Belanja Barang Habis		
01011	Pakai		
2.1.2.1.1	Belanja alat tulis kantor	<u> </u>	
2.1.2.1.2	Belanja materai, perangko		
2.1.2.1.3	dan benda pos lainnya		1
2.1.2.1.3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan		
2.1.2.1.4	pembersih Belanja Bahan Bakar		
2.1.2.1. 4	Minyak/BBM		
	Dst		
	Dst		
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material		
2.1.2.2.1	Belanja bahan baku		
4.1.4.4.1	bangunan		
	Dst		
	Dot		
2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.3.1	Belanja Jasa Kantor Belanja telepon		
2.1.2.3.1	Belanja telepon Belanja air		
2.1.2.3.2			
4.1.4.3.3	Belanja listrik		
			1

•		
2.1.2.3.4	Belanja surat	
	kabar/majalah	
2.1.2.3.5	Belanja surat	
	kawat/faksimil/internet	
2.1.2.3.6	Belanja paket/pengiriman	
2.1.2.3.7	Belanja sertifikasi	
2.1.2.3.8	Belanja jasa transaksi	
2.1.2.0.0	keuangan	
2.1.2.3.9	0	
2.1.2.3.9	Belanja jasa service	
	peralatan/ perlengkapan	
	kantor	
	Dst	
2.1.2.4	Belanja Perawatan	
	Kendaraan Bermotor	
2.1.2.4.1	Belanja jasa service	
2.1.2.4.2	Belanja bahan bakar	
	minyak/gas dan pelumas	
2.1.2.4.3	Belanja penggantian suku	
	cadang	
	Dst	
	DSt	
0105	Delevie C (1 1	
2.1.2.5	Belanja Cetak dan	
	Penggandaan	
2.1.2.5.1	Belanja cetak	
2.1.2.5.2	Belanja	
	penggandaan/fotokopi	
2.1.2.5.3	Belanja rental	
2.1.2.5.4	Belanja dokumentasi	
	Dst	
2.1.2.6	Belanja Sewa Rumah/	
	Gedung/ Gudang/ Parkir	
2.1.2.6.1	Belanja sewa Rumah/	
2.1.2.0.1	Gedung/ Gudang/ Parkir	
2.1.2.6.2	Belanja ruang	
2.1.2.0.2	5	
	rapat/pertemuan	
	Dst	
2.1.2.7	Belanja Sewa Sarana	
	Mobilitas	
2.1.2.7.1	Belanja sewa sarana	
	mobilitas darat	
2.1.2.7.2	Belanja sewa sarana	
	mobilitas air	
	Dst	
2.1.2.8	Belanja Sewa Alat Berat	
2.1.2.8.1	Belanja sewa alat	
4.1.4.0.1	pertanian	
	*	
	Dst	
0100	1	
2.1.2.9	Belanja Sewa	
	Perlengkapan dan	
	Peralatan Kantor	

2.1.2.9.1	Belanja sewa meja kursi		
2.1.2.9.2	Belanja sewa Komputer		
2.1.2.7.2	dan printer		
2.1.2.9.3	Belanja sewa Proyektor		
2.1.2.9.4	Belanja sewa generator		
2.1.2.9.5	Belanja sewa tenda		
2.1.2.9.6	Belanja sewa tenda Belanja sewa pakaian		
2.1.2.5.0	adat/tradisional		
	Dst		
	200		
2.1.2.10	Belanja Makanan dan		
	Minuman		
2.1.2.10.1	Belanja makanan dan		
	minuman rapat		
2.1.2.10.2	Belanja makanan dan		
	minuman tamu		
2.1.2.11	Belanja Pakaian Dinas		
	dan Atributnya, Pakaian		
	Kerja, Pakaian Khusus		
2.1.2.11.1	Belanja pakaian dinas	 	
	harian		
	Dst		
2.1.2.12	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.12.1	Belanja Perjalanan Dinas		
	Dalam Daerah		
2.1.2.12.2	Belanja Perjalanan Dinas		
	Luar Daerah		
2.1.3	Belanja Modal		
0.1.0.1	Delevie Wedel Wessele		
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah		
2.1.3.1 2.1.3.1.1	Belanja Modal Tanah Belanja modal pengadaan tanah kantor		
	Belanja modal pengadaan tanah kantor		
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan		
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan		
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan		
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5 2.1.3.2	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5 2.1.3.2	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5 2.1.3.2	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5 2.1.3.2	Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst		

101001	D-1		
2.1.3.2.4	Belanja modal pengadaan		
	alat penetas		
	Dst		
2.1.3.3	Belanja Modal Alat		
	Angkutan Darat		
	Bermotor/Tidak		
	Bermotor		
2.1.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan		
	alat angkutan darat		
	bermotor roda 2		
2.1.3.3.2	Belanja Modal Pengadaan		
	alat angkutan darat		
	bermotor roda 4		
2.1.3.3.3	Belanja Modal Pengadaan		
	gerobak		
	Dst		
2.1.3.4	Belanja Modal		
	Pengadaan Alat Bengkel		
2.1.3.4.1	Belanja modal pengadaan		
	mesin las		
2.1.3.4.2	Belanja modal pengadaan		
	mesin bubut		
2.1.3.4.3	Belanja modal pengadaan		
2.1.0.1.0	Kompresor		
	Dst		
İ			
2135	Relania Modal		
2.1.3.5	Belanja Modal		
2.1.3.5	Pengadaan Peralatan		
	Pengadaan Peralatan Kantor		
2.1.3.5 2.1.3.5.1	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan		
2.1.3.5.1	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik		
	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung		
2.1.3.5.1	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin fotokopi		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6 2.1.3.6.1 2.1.3.6.2	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6 2.1.3.6.1 2.1.3.6.2 2.1.3.6.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6 2.1.3.6.1 2.1.3.6.2	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6.1 2.1.3.6.2 2.1.3.6.3 2.1.3.6.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6 2.1.3.6.1 2.1.3.6.2 2.1.3.6.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		
2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 2.1.3.5.3 2.1.3.5.4 2.1.3.6.1 2.1.3.6.2 2.1.3.6.3 2.1.3.6.3	Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Belanja modal pengadaan mesin fotokopi Belanja modal pengadaan mesin Stensil Dst		

0.1.0.6.6	D-1	
2.1.3.6.6	Belanja modal pengadaan	
	penunjuk waktu/jam	
2.1.3.6.7	Belanja modal pengadaan	
	meja kursi kerja	
2.1.3.6.8	Belanja modal pengadaan	
	meja kursi rapat	
2.1.3.6.9	Belanja modal pengadaan	
	meja kursi tamu	
2.1.3.6.10	Belanja modal pengadaan	
	penghias ruangan	
	Dst	
	200	
2.1.3.7	Belanja Modal	
2.1.0.7	Pengadaan Komputer	
	dan perlengkapan	
2.1.3.7.1		
2.1.3.7.1	Belanja modal pengadaan	
0.1.0.7.0	Komputer	
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan	
0.1.0 = -	laptop/note book	
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan	
	printer	
2.1.3.7.3	Belanja modal pengadaan	
	scaner	
2.1.3.7.4	Belanja modal pengadaan	
	Monitor	
2.1.3.7.5	Belanja modal pengadaan	
	CPU	
2.1.3.7.6	Belanja modal pengadaan	
	Stabiliser	
2.1.3.7.7	Belanja modal pengadaan	
	kelengkapan komputer	
	(flashdisk, mouse, key	
	board, speaker, dll)	
2.1.3.7.8	Belanja modal pengadaan	
2.1.0.7.0	peralatan jaringan	
	komputer	
	Dst	
	DSt	
0.1.0.0	Delevie Wedel	
2.1.3.8	Belanja Modal	
	Pengadaan Peralatan	
0.1.0.0.1	Dapur	
2.1.3.8.1	Belanja modal pengadaan	
	tabung gas/gas	
2.1.3.8.2	Belanja modal pengadaan	
	kompor gas	
2.1.3.8.3	Belanja modal pengadaan	
	rak piring/gelas	
2.1.3.8.4	Belanja modal pengadaan	
	piring/ gelas/sendok/	
	pisau/dll	
	Dst	
2.1.3.9	Belanja Modal	
	Pengadaan Peralatan	
	Dokumentasi	
	~ J11411171114131	

0.1.0.0.1		T	
2.1.3.9.1	Belanja modal pengadaan		
	kamera		
	Dst		
2.1.3.10	Belanja Modal		
2.1.5.10	Pengadaan Peralatan		
	komunikasi		
2.1.3.10.1	Belanja modal pengadaan		
	telepon		
2.1.3.10.2	Belanja modal pengadaan		
	faksimil		
	Dst		
	Doc		
01011	D-1		
2.1.3.11	Belanja Modal		
	Pengadaan		
	Kontruksi/Pembelian		
	Bangunan		
2.1.3.11.1	Belanja Modal Pengadaan		
	Kontruksi/ Pembelian		
	gedung		
	Dst		
2.1.3.12	Belanja Modal		
	Pengadaan Hewan		
	Ternak dan Tanaman		
2.1.3.12.1	Belanja Modal Pengadaan		
	Hewan Ternak		
2.1.3.12.2	Belanja Modal Pengadaan		
2.1.5.12.2			
	Tanaman		
	Dst		
2.1.3.13	Belanja Modal		
	Pengadaan Alat		
	Keamanan		
2.1.3.13.1	Belanja Modal Pengadaan		
2.1.0.10.1	Alarm/ sirine		
0.1.0.10.0	,		
2.1.3.13.2	Belanja Modal Pengadaan		
	senter		
	Dst		
2.2	BELANJA TIDAK		
	LANGSUNG		
2.2.1	Polonio Pogorroi		1
	Belanja Pegawai		
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala		
	Desa dan Perangkat Desa		
2.2.1.2	Tambahan Penghasilan		
	Kepala Desa dan		
	Perangkat Desa		
2.2.1.3	Uang kehormatan BPD		
2.2.1.4	Penghasilan Pokok		
4.4.1.7			
	Aparatur Pemerintah		
	Desa Karangkopek		
2.2.1.5	Onderstand Perangkat		
	Desa Karangkopek		

	T		1
2.2.1.6	Jaminan Hari Tua Aparat		
	Desa Karangkopek		
2.2.1.7	Tunjangan Suami/Istri		
2.2.1.8	Tunjangan Anak		
2.2.1.9	Tunjangan Kesehatan		
2.2.1.10	Uang Penghargaan Purna		
	Tugas Kepala Desa dan		
	Perangkat Desa Lainnya		
2.2.1.11	Uang Santunan		
	Kecelakaan/kematian		
2.2.1.12	Uang Santunan Duka		
2.2.1.13	Honor Bendahara Desa		
	Dst		
2.2.2	Belanja Subsidi		
2.2.2.1	Belanja subsidi produksi		
	Usaha Desa		
2.2.2.2	Dst		
4.4.4.4	DOL		
2.2.3	Belanja Hibah		
2.2.3.1		+	
2.2.3.1	Belanja hibah kepada usaha kelompok		
	-		
2.2.3.2	masyarakat		
2.2.3.2	Belanja hibah kepada		
	kelompok kegiatan		
	ekonomi produktif		
	Dst		
0.0.4	Dalania Dantaran Carial		
	Relanta Bantilan Social		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial		
	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia		
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial		
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan		
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah		
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst		
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna Belanja Bantuan		
2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Belanja bantuan sosial panti asuhan Belanja hadiah Dst Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna Belanja Bantuan		

0.0 5.5	D 1 1 D 1		1
2.2.5.7	Belanja Bantuan		
	Keuangan kepada		
	posyandu		
2.2.5.8	Belanja Bantuan		
	Keuangan		
	penyelenggaraan		
	pemilihan Kepala Desa		
2.2.5.9	Belanja Bantuan		
	Keuangan pengisian		
	perangkat desa lainnya		
2.2.5.10	Belanja Bantuan		
2.2.3.10			
	Keuangan pembentukan BPD		
	Dst		
2.2.6	Belanja tak terduga		
2.2.6.1	Pemakaman mayat tak		
	dikenal		
2.2.6.2	Bencana alam		
	Dst		
.тг	UMLAH BELANJA		
0	ONIDATI BEDANGA		
CIID	DI IIO/OII DA MAIIIIN		
	PLUS(SILPA TAHUN		
BE	RJALAN)/DEFISIT		
BE ((Pend	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan		
BE ((Pend	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan nn) - (Belanja + Pengeluaran		
BE ((Pend	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan		
BE ((Pend	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan nn) - (Belanja + Pengeluaran		
BE ((Pend	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan nn) - (Belanja + Pengeluaran		
BE ((Pend Pembiayad	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan))		
Pembiayaa	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN		
Pembiayaa 3 3.1	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan		
Pembiayaa	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan		
Pembiayaa 3 3.1	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun		
## A Second Period	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.		
Pembiayaa 3 3.1	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan n) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan		
## A Second Period	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan n) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.		
## A state of the content of the con	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa)		
## A Second Period	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan n) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan		
## A state of the content of the con	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak		
## A state of the content of the con	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.		
## A state of the content of the con	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak		
3.1.1 3.1.2 3.1.3	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.		
3.1.2 3.1.3 3.1.4	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman		
3.1.1 3.1.2 3.1.3	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan n) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran		
3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.2	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan		
3.1.2 3.1.3 3.1.4	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan n) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Pembentukan Dana		
3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan		
3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.2	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan n) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Pembentukan Dana		
3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan		
3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan		
3.1.3 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1	RJALAN)/DEFISIT dapatan + Penerimaan an) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan		

3.2.3	Pembayaran utang		
J	JUMLAH PEMBIAYAAN		

	,	
KEPALA DE	SA	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •

B. Contoh format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

PERATURA:	N DESA
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA	
-------------	--

Menimbang:

- a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun perencanaan pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/kelebihan/kekuranganpendapatan/pergese ran antar jenis anggaran/keadaan darurat/keadaan luar biasa)* sehingga mengakibatkan harus dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk hukum Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 13. Dst

Dengan Persetujuan Bersama

BADA	N PERMUSYAWARATAN DESA	
	DAN	
	KEPALA DESA	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARA 	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah adalah desa
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
- 7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

- 8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- 9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 14. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.

•

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN DESA

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

1.	Per	ıdapatan	Desa	semul	a sejumlah	Rp.	
	bertambah/berkurang)*			ng)*	sehing	gga	menjadi
	Rp.	•••••		. terdiri	i dari:		
	a.	Pendapa	tan	Asli	Desa	semula	sejumlah
		Rp	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	bertambah/b	erkura	ng)* sehingga
		menjadi	Rp				

	b.	Dana Alokasi Desa semula sejumlah Rp
		bertambah/berkurang)* sehingga menjadi
		Rp
	c.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah
		Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah
		Rp
	d.	Hibah dan sumbangan sejumlah Rp
2.	Bel	anja Desa semula sejumlah Rp
	ber	tambah/berkurang)* sehingga menjadi Rp
	tero	liri dari:
	a.	Belanja Langsung semula sejumlah Rp
		bertambah/berkurang)* sehingga menjadi
		Rp
	b.	Belanja Tidak Langsung semula sejumlah
		Rp bertambah/berkurang)* sehingga
		menjadi Rp
3.	Pen	nbiayaan sejumlah Rp terdiri dari:
	a.	Penerimaan pembiayaan semula sejumlah Rp.
		bertambah/berkurang)* sehingga
		menjadi Rp
	b.	Pengeluaran pembiayaan semula sejumlah
		Rp bertambah/berkurang)* sehingga
		menjadi Rp
4.	Rin	cian lebih lanjut mengenai Perubahan Pendapatan,
	Bel	anja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam
	lam	piran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
	Per	aturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

	Agar	setiap	orang	m	engetahuinya,	memerintahkan
	pengund	angan Per	aturan	Desa	ini dengan per	nempatannya dalam
	Berita Da	aerah Desa	a			
					Ditetapkan di	
					pada tanggal	
					KEPALA DESA	A
Diundangkar	n di	••••••				
pada tanggal	•••••	•••••	••••			
SEKRETARIS	DESA					
	•••••					
BERITA DAE	RAH DES					EN KULON PROGO
		TAH	IUN N	OMC	PR	

LAMPIRAN : PE	ERATURAN I	DESA	• • • • • • • • • •		
N	OMOR	TAHUN		. •	

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAH AN	SETELAH PERUBAH AN	BERTAM BAH/ BERKU- RANG	KET\ SUMBER DANA
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli				
	Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Badan Usaha Milik				
1.1.1.1	Desa Desa				
1.1.1.2	Hasil Kerjasama				
1.1.1.3	Lumbung Desa				
	Dst				
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Tanah Desa				
1.1.2.2	Tanah bukan milik				
	Desa yang				
	dikuasai dan/				
	atau dimanfaatkan				
	pengelolaannya Desa				
1.1.2.3	Pasar Desa				
1.1.2.4	Bangunan milik				
1.1.2.1	Desa				
1.1.2.5	Obyek				
	wisata/rekreasi				
	milik Desa				
1.1.2.6	Tempat pelelangan				
	ikan yang dikelola				
1 1 0 7	Desa				
1.1.2.7	Hutan Desa				
1.1.2.8	Jalan Desa				
1.1.2.9	Lapangan Desa Lain-lain kekayaan				
1.1.2.10	milik desa				
	Dst				
1.1.3	Pungutan Desa				
1.1.3.1	Biaya ganti cetak				
	blangko				
1.1.3.2	Biaya legalisasi				

		1	T	1	T
1.1.3.3	Dana				
	pemeliharaan				
	sarana/ prasarana				
	Desa				
1.1.3.4	Dana				
	pembangunan				
1.1.3.5	Pungutan atas				
1.1.0.0	jasa/ manfaat				
	yang diberikan				
	oleh Desa				
	Dst				
1 1 4					
1.1.4	Hasil Swadaya				
	dan Partisipasi				
1.1.4.1	Hasil swadaya dan				
	partisipasi				
	Dst				
1.1.5	Hasil Gotong				
	Royong				
1.1.5.1	Hasil Gotong				
	Royong				
	Dst				
1.1.6	Lain-lain				
	Pendapatan Asli				
	Desa yang sah				
1.1.6.1	Jasa Giro dan				
1.1.0.1					
1160	pendapatan bunga				
1.1.6.2	Tuntutan ganti				
	rugi				
1.1.6.3	Komisi, potongan,				
	bentuk lain akibat				
	dari penjualan				
	dan/atau				
	pengadaan				
	barang/jasa oleh				
	Desa				
	Dst				
1.2	Dana Alokasi				
	Desa (DAD)				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak				
· ···	Daerah/				
	Kabupaten				
1.2.2	Bagi Hasil				
1.4.4	Retribusi Daerah/				
	- I				
1.0.0	Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
	(ADD)				

Handa Reuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 1.3.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Dst		T	I	1	1	I
Pemerintah dan Pemerintah Daerah 1.3.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Dst	1.3	Bantuan				
Pemerintah Daerah		Keuangan				
1.3.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Dst		Pemerintah dan				
1.3.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Dst		Pemerintah				
1.3.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Dst						
Reuangan Pemerintah Pusat		Dacian				
Reuangan Pemerintah Pusat	101	D 4				
Pemerintah Pusat Dat	1.3.1					
1.3.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Dst						
1.3.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Dst		Pemerintah Pusat				
1.3.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Dst		Dst				
Keuangan Pemerintah Propinsi Dst						
Keuangan Pemerintah Propinsi Dst	1.3.2	Bantuan				
Pemerintah Propinsi Dst		Kenangan				
Dst						
1.3.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah 1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst 1.4 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi						
1.3.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah 1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst						
Keuangan Pemerintah Daerah 1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	_	Dst				
Keuangan Pemerintah Daerah 1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst						
Pemerintah Daerah 1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	1.3.3					
1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst						
1.3.3.1 Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst		Pemerintah				
Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst		Daerah				
Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	1.3.3.1	Tambahan				
Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	_,_,_					
Desa (TPAPD) 1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst						
1.3.3.2 Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst						
Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	1 2 2 0					
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	1.3.3.2					
Permusyawaratan Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst						
Desa (BPD) 1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst						
1.3.3.3 Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst		_				
Aparat Pemerintah Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst		Desa (BPD)				
Desa Karangkopek 1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	1.3.3.3	Penghasilan Pokok				
1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst		Aparat Pemerintah				
1.3.3.4 Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst		Desa Karangkopek				
Aparat Pemerintah Desa Karangkopek Dst	1.3.3.4					
Desa Karangkopek Dst	2,0,0,					
1.4 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi		I =				
1.4 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi						
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi		Dst				
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi						
pihak ketiga yang tidak mengikat 1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi	1.4					
tidak mengikat 1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi		_				
1.4.1 Hibah dan sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi						
sumbangan dari pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah		tidak mengikat				
pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah	1.4.1	Hibah dan				
pemerintah 1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah		sumbangan dari				
1.4.2 Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah						
sumbangan dari pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah	1.4.2					
pemerintah propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah	·					
propinsi 1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah		_				
1.4.3 Hibah dan sumbangan dari pemerintah						
sumbangan dari pemerintah	1 / 2					
pemerintah	1.4.3					
kabupaten		-				
		kabupaten				

TT'1 1 1				
kelompok				
masyarakat/				
perorangan				
Dst				
H PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA				
LANGSUNG				
Belanja Pegawai				
Honorarium				
pari corraga riorja				
Belania				
3,				
Belania Barang				
kantor				
Belania materai.				
-				
Belania				
Belania Jasa				
Kantor				
l Belania telepon				i e
Belanja telepon Belanja air				
Belanja telepon Belanja air Belanja listrik				
	perorangan Dst	sumbangan dari badan/lembaga/ organisasi swasta Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/ perorangan Dst	sumbangan dari badan/lembaga/ organisasi swasta Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/ perorangan Dst	sumbangan dari badan/lembaga/ organisasi swasta Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/ perorangan Dst

	1	I	1	1	I
2.1.2.3.4	Belanja surat				
	kabar/majalah				
2.1.2.3.5	Belanja surat				
	kawat/faksimil/int				
	ernet				
2.1.2.3.6	Belanja				
	paket/pengiriman				
2.1.2.3.7	Belanja sertifikasi				
2.1.2.3.8	Belanja jasa				
	transaksi				
	keuangan				
2.1.2.3.9	Belanja jasa				
	service peralatan/				
	perlengkapan				
	kantor				
	Dst				
2.1.2.4	Belanja				
	Perawatan				
	Kendaraan				
	Bermotor				
2.1.2.4.1	Belanja jasa				
	service				
2.1.2.4.2	Belanja bahan				
	bakar minyak/gas				
	dan pelumas				
2.1.2.4.3	Belanja				
	penggantian suku				
	cadang				
	Dst				
2.1.2.5	Belanja Cetak dan				
	Penggandaan				
2.1.2.5.1	Belanja cetak				
2.1.2.5.2	Belanja				
	penggandaan/foto				
	kopi				
2.1.2.5.3	Belanja rental				
2.1.2.5.4	Belanja				
	dokumentasi				
	Dst				
0105	Data at C				
2.1.2.6	Belanja Sewa				
	Rumah/ Gedung/				
01061	Gudang/ Parkir				
2.1.2.6.1	Belanja sewa				
	Rumah/ Gedung/				
0.1.0.6.0	Gudang/ Parkir				
2.1.2.6.2	Belanja ruang				
	rapat/pertemuan				
	Dst				

2.1.2.7	Belanja Sewa				
	Sarana Mobilitas				
2.1.2.7.1	Belanja sewa				
	sarana mobilitas				
	darat				
2.1.2.7.2	Belanja sewa				
	sarana mobilitas				
	air				
	Dst				
	•••••				
2.1.2.8	Belanja Sewa Alat				
2.1.2.0	Berat				
2.1.2.8.1	Belanja sewa alat				
2.1.2.0.1	pertanian				
	Dst				
2.1.2.9	Belanja Sewa				
	Perlengkapan dan				
	Peralatan Kantor				
2.1.2.9.1	Belanja sewa meja				
	kursi				
2.1.2.9.2	Belanja sewa				
	Komputer dan				
	printer				
2.1.2.9.3	Belanja sewa				
0.1.0.0.4	Proyektor				
2.1.2.9.4	Belanja sewa				
0.1.0.0.5	generator				
2.1.2.9.5 2.1.2.9.6	Belanja sewa tenda				
2.1.2.9.0	Belanja sewa pakaian				
	adat/tradisional				
	Dst				
2.1.2.10	Belanja Makanan				
	dan Minuman				
2.1.2.10.1	Belanja makanan				
	dan minuman				
	rapat				
2.1.2.10.2	Belanja makanan				
	dan minuman				
	tamu				
01011	Dolomia Dolosian				
2.1.2.11	Belanja Pakaian Dinas dan				
	Atributnya,				
	Pakaian Kerja,				
	Pakaian Khusus				
2.1.2.11.1	Belanja pakaian				
,, <u>_</u> ,_,_,,	dinas harian				
	Dst				
	1	I	1	<u> </u>	<u>I</u>

Relania				
Daerah				
Belanja Perjalanan				
Dinas Luar Daerah				
Belanja Modal				
_				
_				
sarana kesehatan				
Belanja modal				
pengadaan tanah				
sarana pendidikan				
_				
-				
Belanja Modal				
Alat Pertanian				
dan Perkebunan				
1 0				
-				
Belanja modal				
pengadaan alat				
penetas				
Dst				
D 1 1 25 1 1				
_				
Bermotor Bermotor				
			•	Ĩ
Bermotor				
Bermotor				
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Tanah Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Belanja Modal Belanja modal Belanja modal pengadaan tanah kantor Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Belanja modal pengadaan tanah selanja modal pengadaan tanah selanja modal pengadaan tanah pertanian Belanja modal pengadaan tanah perkebunan Dst

		T	1	1	1
2.1.3.3.1	Belanja Modal				
	Pengadaan alat				
	angkutan darat				
	bermotor roda 2				
2.1.3.3.2	Belanja Modal				
	Pengadaan alat				
	angkutan darat				
	bermotor roda 4				
2.1.3.3.3	Belanja Modal				
2.1.0.0.0	Pengadaan				
	gerobak				
	Dst				
	DSt				
2.1.3.4	Belanja Modal				
2.1.3. ⁺	Pengadaan Alat				
	Bengkel				
2.1.3.4.1					
2.1.3.4.1	Belanja modal				
	pengadaan mesin				
0.1.0.4.0	las				
2.1.3.4.2	Belanja modal				
	pengadaan mesin				
	bubut				
2.1.3.4.3	Belanja modal				
	pengadaan				
	Kompresor				
	Dst				
2.1.3.5	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Peralatan Kantor				
2.1.3.5.1	Belanja modal				
	pengadaan mesin				
	tik				
2.1.3.5.2	Belanja modal				
	pengadaan mesin				
	hitung				
2.1.3.5.3	Belanja modal				
2.1.0.0.0	pengadaan mesin				
	fotokopi				
2.1.3.5.4	Belanja modal				
4.1.0.0.7	pengadaan mesin				
	Stensil				
	Dst				
0106	Dolomia 1/2-1-1			-	
2.1.3.6	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Perlengkapan				
	Kantor				
2.1.3.6.1	Belanja modal				
	pengadaan meja				
	gambar				
2.1.3.6.2	Belanja modal				
	pengadaan almari				
			<u> </u>		

		T	1	T
2.1.3.6.3	Belanja modal			
	pengadaan			
	Brankas			
2.1.3.6.4	Belanja modal			
	pengadaan Filing			
	kabinet			
2.1.3.6.5	Belanja modal			
	pengadaan white			
	board/papan tulis			
2.1.3.6.6	Belanja modal			
2.1.5.0.0	pengadaan			
	penunjuk			
0.1.0.6.7	waktu/jam			
2.1.3.6.7	Belanja modal			
	pengadaan meja			
	kursi kerja			
2.1.3.6.8	Belanja modal			
	pengadaan meja			
	kursi rapat			
2.1.3.6.9	Belanja modal			
	pengadaan meja			
	kursi tamu			
2.1.3.6.10	Belanja modal			
	pengadaan			
	penghias ruangan			
	Dst			
2.1.3.7	Belanja Modal			
2.1.0.7	Pengadaan			
I .				
	_			
	Komputer dan			
01271	Komputer dan perlengkapan			
2.1.3.7.1	Komputer dan perlengkapan Belanja modal			
2.1.3.7.1	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan			
	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer			
2.1.3.7.1	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal			
	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan			
2.1.3.7.2	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book			
	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal			
2.1.3.7.2	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer			
2.1.3.7.2	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan printer			
2.1.3.7.2	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan printer			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan scaner			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4 2.1.3.7.5 2.1.3.7.6	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan Stabiliser			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4 2.1.3.7.5 2.1.3.7.6	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan Stabiliser			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4 2.1.3.7.5 2.1.3.7.6	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal pengadaan			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4 2.1.3.7.5 2.1.3.7.6	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal pengadaan Stabiliser			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4 2.1.3.7.5 2.1.3.7.6	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flashdisk,			
2.1.3.7.2 2.1.3.7.2 2.1.3.7.3 2.1.3.7.4 2.1.3.7.5 2.1.3.7.6	Komputer dan perlengkapan Belanja modal pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan laptop/note book Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan scaner Belanja modal pengadaan Monitor Belanja modal pengadaan CPU Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal pengadaan Stabiliser Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board,			

			1	1	T
2.1.3.7.8	Belanja modal				
	pengadaan				
	peralatan jaringan				
	komputer				
	Dst				
2.1.3.8	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Peralatan Dapur				
2.1.3.8.1	Belanja modal				
2.1.0.0.1	pengadaan tabung				
	gas/gas				
2.1.3.8.2	Belanja modal				
2.1.5.6.2	_				
	pengadaan kompor				
2.1.3.8.3	gas				
2.1.3.8.3	Belanja modal				
	pengadaan rak				
0.1.0.0.1	piring/gelas				
2.1.3.8.4	Belanja modal				
	pengadaan piring/				
	gelas/sendok/				
	pisau/dll				
	Dst				
2.1.3.9	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Peralatan				
	Dokumentasi				
2.1.3.9.1	Belanja modal				
	pengadaan kamera				
	Dst				
2.1.3.10	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Peralatan				
	komunikasi				
2.1.3.10.1	Belanja modal				
2.1.0.10.1	pengadaan telepon				
2.1.3.10.2	Belanja modal				
4.1.0.10.4	pengadaan				
	faksimil				
	Dst				
	JUL				
2.1.3.11	Polonio Model				
4.1.3.11	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Kontruksi/Pembe				
010111	lian Bangunan				
2.1.3.11.1	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Kontruksi/				
	Pembelian gedung				
	Dst				
· 		·			

0.1.0.10	I	1			
2.1.3.12	Belanja Modal				
	Pengadaan Hewan				
	Ternak dan				
	Tanaman				
2.1.3.12.1	Belanja Modal				
	Pengadaan Hewan				
	Ternak				
2.1.3.12.2	Belanja Modal				
	Pengadaan				
	Tanaman				
	Dst				
0.1.0.10	D 1 1 25 1 1				
2.1.3.13	Belanja Modal				
ı	Pengadaan Alat				
0.1.0.10.1	Keamanan				
2.1.3.13.1	Belanja Modal				
	Pengadaan				
0.1.0.10.0	Alarm/ sirine				
2.1.3.13.2	Belanja Modal				
	Pengadaan senter				
	Dst				
2.2	BELANJA TIDAK				
	LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.1.1	Penghasilan Tetap				
	Kepala Desa dan				
	Perangkat Desa				
2.2.1.2	Tambahan				
	Penghasilan				
	Aparatur				
	Pemerintah Desa				
2.2.1.3	Uang kehormatan				
	BPD				
2.2.1.4	Penghasilan Pokok				
	Aparatur				
	Pemerintah Desa				
	Karangkopek				
2.2.1.5	Onderstand				
	Perangkat Desa				
	Karangkopek				
2.2.1.6	Jaminan Hari Tua				
	Aparat Desa				
	Karangkopek				
2.2.1.7	Tunjangan				
	Suami/Istri				
2.2.1.8	Tunjangan Anak				
2.2.1.9	Tunjangan				
	Kesehatan			<u> </u>	
2.2.1.10	Uang Penghargaan				
	Purna Tugas				
	Kepala Desa dan				
	Perangkat Desa				
	Lainnya				
			•	•	

2.2.1.11 Uang Santunan Kecelakaan/kemat ian Uang Santunan Duka Duka Duka Desa Dat Desa Dat Desa Dat Desa Dat Desa Dat Desa Dat Desa Desa Dat Desa Dat Desa Desa Dat Desa Desa Dat Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa			1	1		1
Same Samtunan Duka	2.2.1.11	_				
2.2.1.12 Uang Santunan Duka 2.2.1.13 Honor Bendahara Desa Dst		Kecelakaan/kemat				
Duka 2.2.1.13 Honor Bendahara Desa Desa Dst		ian				
Duka Honor Bendahara Desa Dst	2.2.1.12	Uang Santunan				
Desa Dst						
Desa Dst	2.2.1.13	Honor Bendahara				
2.2.2 Belanja Subsidi 2.2.2.1 Belanja subsidi produksi Usaha Desa 2.2.2.2 Dst						
2.2.2 Belanja Subsidi produksi Usaha Desa 2.2.2.2 Dst						
2.2.2.1 Belanja subsidi produksi Usaha Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Des						
2.2.2.1 Belanja subsidi produksi Usaha Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Des	222	Relania Subsidi				
produksi Usaha Desa 2.2.2.2 Dst						
2.2.2.2 Dst	2.2.2.1					
2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat 2.2.3.2 Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif Dst		produksi Usana				
2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat 2.2.3.2 Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif Dst	0.0.0					
2.2.3.1 Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat 2.2.3.2 Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif	2.2.2.2	Dst				
2.2.3.1 Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat 2.2.3.2 Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif						
kepada usaha kelompok masyarakat 2.2.3.2 Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif Dst						
kelompok masyarakat 2.2.3.2 Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif Dst	2.2.3.1					
masyarakat Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif Dst						
2.2.3.2 Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif Dst		kelompok				
kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif Dst		masyarakat				
kegiatan ekonomi produktif Dst	2.2.3.2	Belanja hibah				
kegiatan ekonomi produktif Dst		kepada kelompok				
produktif Dst						
Dst						
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 2.2.4.1 Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst		*				
Sosial 2.2.4.1 Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst		200				
Sosial 2.2.4.1 Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst	224	Polonio Pontuon				
2.2.4.1 Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst	4.4. T					
sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst	0 0 4 1					
Anak Usia Dini (PAUD) 2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst	2.2.4.1					
(PAUD) 2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst						
2.2.4.2 Belanja bantuan sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst						
sosial panti asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst	0.0.4.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
asuhan 2.2.4.3 Belanja hadiah Dst	2.2.4.2					
2.2.4.3 Belanja hadiah Dst						
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 2.2.5.1 Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan 2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK						
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 2.2.5.1 Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan 2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK	2.2.4.3					
Keuangan 2.2.5.1 Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan 2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK		Dst				
Keuangan 2.2.5.1 Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan 2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK						
Keuangan2.2.5.1Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan2.2.5.2Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD2.2.5.3Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW2.2.5.4Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK2.2.5.5Belanja Bantuan Keuangan kepada2.2.5.5Belanja Bantuan Keuangan kepada	2.2.5					
2.2.5.1 Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan 2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK		Keuangan				
keuangan kepada Pedukuhan 2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK	2.2.5.1	Belanja bantuan				
Pedukuhan 2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada						
2.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada						
Keuangan kepada LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada	2.2.5.2					
LPMD 2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada						
2.2.5.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada						
Keuangan kepada RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada	2.2.5.3				1	
RT/RW 2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada		5				
2.2.5.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada						
Keuangan kepada PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada	2254	,			1	
PKK 2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada	2.2.5.4					
2.2.5.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada		_				
Keuangan kepada	0077					
	2.2.5.5					
Karang Taruna						
		Karang Taruna				

		T	1	T	1
2.2.5.6	Belanja Bantuan				
	Keuangan kepada				
	Satgas Linmas				
2.2.5.7	Belanja Bantuan				
	Keuangan kepada				
	posyandu				
2.2.5.8	Belanja Bantuan				
2.2.0.0	Keuangan				
	penyelenggaraan				
	pemilihan Kepala				
2252	Desa				
2.2.5.9	Belanja Bantuan				
	Keuangan				
	pengisian				
	perangkat desa				
	lainnya				
2.2.5.10	Belanja Bantuan				
	Keuangan				
	pembentukan BPD				
	Dst				
	200				
2.2.6	Belanja tak				
2.2.0	terduga				
2.2.6.1	Pemakaman mayat				
2.2.0.1	tak dikenal				
0.0.6.0					
2.2.6.2	Bencana alam				
	Dst				
JUMI	LAH BELANJA				
	•				
SURPLU	JS(SILPA TAHUN				
	ALAN)/DEFISIT				
	atan + Penerimaan				
• • • • •	yaan) - (Belanja +				
	aran Pembiayaan))				
Tengeiuc					
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan				
	Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih				
	Perhitungan				
	Anggaran (SILPA)				
	tahun sebelumnya.				
3.1.2	Hasil penjualan				
	kekayaan Desa				
	yang dipisahkan.				
	(tanah kas desa)				
2 1 2	,				
3.1.3	Hasil penjualan				
	L KEKAWAAN LIBRA	l	1	1	I
	kekayaan Desa				
	yang tidak dipisahkan.				

3.1.4	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran utang		
JUMI	LAH PEMBIAYAAN		

, tanggal
KEPALA DESA,
REI REI DEOIL,

C. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN DESA

PERATURAN DESA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NOMOR	TAHUN	

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA D	ESA		
----------	-----	--	--

Menimbang:

- a. bahwa jangka waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran telah selesai;
- d. bahwa setelah berakhirnya tahun anggaran perlu dilakukan perhitungan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana e. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 13. Dst

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
dan	
KEPALA DESA	

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah adalah desa
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.

- 7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
- 8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- 9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 14. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
- 15. Dst

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari :

- 1. Pendapatan Desa sejumlah Rp. terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp.
 - b. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp.
 - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah Rp.
 - d. Hibah dan sumbangan sejumlah Rp.
- 2. Belanja Desa sejumlah Rp. terdiri dari:
 - a. Belanja Langsung sejumlah Rp.
 - b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
- 3. Pembiayaan sejumlah Rp. terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.
 - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.
- 4. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

	penguno	_	raturan D	esa ini dengan pen	
Diundangkar pada tanggal					
SEKRETARIS	DESA				
BERITA	DAERAH	KABUI		KECAMATAN LON PROGO	

LAMPIRAN : PERATUF	RAN DESA
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN BERJALAN/ SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	KET. (+/-)
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa			
1.1.1.2	Hasil Kerjasama			
1.1.1.3	Lumbung Desa			
	Dst			
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Desa			
1.1.2.2	Tanah bukan milik Desa yang dikuasai dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Desa			
1.1.2.3	Pasar Desa			
1.1.2.4	Bangunan milik Desa			
1.1.2.5	Obyek wisata/rekreasi milik Desa			
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Hutan Desa			
1.1.2.8	Jalan Desa			
1.1.2.9	Lapangan Desa			
1.1.2.10	Lain-lain kekayaan milik desa			
	Dst			
1.1.3	Pungutan Desa			
1.1.3.1	Biaya ganti cetak blangko			
1.1.3.2	Biaya legalisasi			
1.1.3.3	Dana pemeliharaan sarana/ prasarana Desa			
1.1.3.4	Dana pembangunan			
1.1.3.5	Pungutan atas jasa/ manfaat yang diberikan oleh Desa			

		<u> </u>	<u> </u>	
	Dst			
1.1.4	Hasil Swadaya dan			
	Partisipasi			
1.1.4.1	Hasil swadaya dan			
	partisipasi			
	Dst			
1.1.5	Hasil Gotong Royong			
1.1.5.1	Hasil Gotong Royong			
	Dst			
1.1.6	Lain-lain Pendapatan			
	Asli Desa yang sah			
1.1.6.1	Jasa Giro dan			
1,1,0,1	pendapatan bunga			
1.1.6.2	Tuntutan ganti rugi			
1.1.6.3	Komisi, potongan,			
1.1.0.0	bentuk lain akibat dari			
	penjualan dan/atau			
	pengadaan barang/jasa			
	oleh Desa			
	Dst			
	Dst			
1.2	Dana Alokasi Desa			
1.2				
1 0 1	(DAD)			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak			
1.0.0	Daerah/ Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi			
1.0.0	Daerah/ Kabupaten			
1.2.3	Alokasi Dana Desa			
	(ADD)			
1.3	Bantuan Keuangan			
	Pemerintah dan			
	Pemerintah Daerah			
1.3.1	Bantuan Keuangan			
	Pemerintah Pusat			
	Dst			
1.3.2	Bantuan Keuangan			
	Pemerintah Propinsi			
	Dst			
1.3.3	Bantuan Keuangan			
	Pemerintah Daerah			
1.3.3.1	Tambahan Penghasilan			
	Aparat Pemerintah			
	Desa (TPAPD)			
1.3.3.2	Tunjangan Kehormatan			
	Badan			
	Permusyawaratan Desa			
	(BPD)			
				
		ı	1	1

1 0 0 0	D 1 1 D 1 1	<u> </u>		
1.3.3.3	Penghasilan Pokok			
	Aparat Pemerintah			
	Desa Karangkopek			
1.3.3.4	Jaminan Hari Tua			
	Aparat Pemerintah			
	Desa Karangkopek			
	Dst			
1.4	Hibah dan sumbangan			
1.7	dari pihak ketiga yang			
	tidak mengikat			
1.4.1	Hibah dan sumbangan			
	dari pemerintah			
1.4.2	Hibah dan sumbangan			
	dari pemerintah			
	provinsi			
1.4.3	Hibah dan sumbangan			
1.1.0	dari pemerintah			
	kabupaten			
1.4.4	-			
1.4.4	Hibah dan sumbangan			
	dari badan/lembaga/			
1 4 5	organisasi swasta			
1.4.5	Hibah dan sumbangan			
	dari kelompok			
	masyarakat/			
	perorangan			
	Dst			
JUM	ILAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.1.1	Honorarium			
2.1.1.2	Uang Sidang			
2.1.1.3	Upah tenaga kerja			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
	<u> </u>			
2.1.2.1	Belanja Barang Habis			
	Pakai			
2.1.2.1.1	Belanja alat tulis			
	kantor			
2.1.2.1.2	Belanja materai,		1	
4.1.4.1.4	perangko dan benda			
	pos lainnya			
2.1.2.1.3	Belanja peralatan			
4.1.4.1.3	kebersihan dan bahan			
2.1.2.1.4	pembersih			
	010010 PODON POROK	1	i	1
4.1.4.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM			

	Dst		
2.1.2.2	Belanja		
	Bahan/Material		
2.1.2.2.1	Belanja bahan baku		
2.1.2.2.1	bangunan		
	Dst		
	Dst		
0.1.0.0	D 1 ' T T		
2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor		
2.1.2.3.1	Belanja telepon		
2.1.2.3.2	Belanja air		
2.1.2.3.3	Belanja listrik		
2.1.2.3.4	Belanja surat		
	kabar/majalah		
2.1.2.3.5	Belanja surat		
,,,,	kawat/faksimil/internet		
2.1.2.3.6	Belanja		
4.1.2.0.0	paket/pengiriman		
2.1.2.3.7			
	Belanja sertifikasi		
2.1.2.3.8	Belanja jasa transaksi		
0.1.0.0.5	keuangan		
2.1.2.3.9	Belanja jasa service		
	peralatan/		
	perlengkapan kantor		
	Dst		
2.1.2.4	Belanja Perawatan		
	Kendaraan Bermotor		
2.1.2.4.1	Belanja jasa service		
2.1.2.4.2	Belanja bahan bakar		
2.1.2.1.2	minyak/gas dan		
	pelumas		
2.1.2.4.3	*		
2.1.2.4.3	Belanja penggantian		
	suku cadang		
	Dst		
2.1.2.5	Belanja Cetak dan		
	Penggandaan		
2.1.2.5.1	Belanja cetak		
2.1.2.5.2	Belanja	 	
	penggandaan/fotokopi		
2.1.2.5.3	Belanja rental		
2.1.2.5.4	Belanja dokumentasi		
4,1,4,0,1	Dst		
2.1.2.6	Rolania Sawa Burnak /		
4.1.4.0	Belanja Sewa Rumah/		
	Gedung/ Gudang/		
0.1.0.6.1	Parkir		
2.1.2.6.1	Belanja sewa Rumah/		
	Gedung/ Gudang/		
	Parkir		
2.1.2.6.2	Belanja ruang		
	rapat/pertemuan		
	Dst		

2.1.2.7	Belanja Sewa Sarana		
	Mobilitas		
2.1.2.7.1	Belanja sewa sarana mobilitas darat		
2.1.2.7.2	Belanja sewa sarana		
	mobilitas air		
	Dst		
2.1.2.8	Belanja Sewa Alat Berat		
2.1.2.8.1	Belanja sewa alat		
	pertanian		
	Dst		
0.1.0.0	D.1		
2.1.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan		
	Peralatan Kantor		
2.1.2.9.1	Belanja sewa meja		
	kursi		
2.1.2.9.2	Belanja sewa Komputer		
	dan printer		
2.1.2.9.3	Belanja sewa Proyektor		
2.1.2.9.4	Belanja sewa generator		
2.1.2.9.5	Belanja sewa tenda		
2.1.2.9.6	Belanja sewa pakaian		
	adat/tradisional		
	Dst		
2 1 2 10	Relania Makanan dan		
2.1.2.10	Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.2.10 2.1.2.10.1	=		
	Minuman		
	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan		
2.1.2.10.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu		
2.1.2.10.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya,		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja,		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja,		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11.1 2.1.2.12.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11 2.1.2.12.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11 2.1.2.12.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.11 2.1.2.11 2.1.2.12 2.1.2.12 2.1.2.12.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.11 2.1.2.11 2.1.2.12 2.1.2.12 2.1.2.12.1 2.1.2.13 2.1.3.1	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst		
2.1.2.10.1 2.1.2.10.2 2.1.2.11 2.1.2.11.1 2.1.2.12 2.1.2.12.1 2.1.2.12.2	Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus Belanja pakaian dinas harian Dst Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal		

	1=	T		1
2.1.3.1.2	Belanja modal			
	pengadaan tanah			
	sarana kesehatan			
2.1.3.1.3	Belanja modal			
	pengadaan tanah			
	sarana pendidikan			
2.1.3.1.4	Belanja modal			
2.1.0.1.1	pengadaan tanah			
	pertanian			
01015	4			
2.1.3.1.5	Belanja modal			
	pengadaan tanah			
	perkebunan			
	Dst			
2.1.3.2	Belanja Modal Alat			
	Pertanian dan			
	Perkebunan			
2.1.3.2.1	Belanja modal			
	pengadaan traktor			
2.1.3.2.2	Belanja modal			1
4.1.0.4.4				
	pengadaan penggiling			
0.1.0.0.0	hasil pertanian			
2.1.3.2.3	Belanja modal			
	pengadaan alat			
	pengering gabah			
2.1.3.2.4	Belanja modal			
	pengadaan alat penetas			
	Dst			
2.1.3.3	Belanja Modal Alat			
	Angkutan Darat			
	Bermotor/Tidak			
	Bermotor			
2.1.3.3.1	Belanja Modal			
2.1.0.0.1	Pengadaan alat			
	angkutan darat			
	bermotor roda 2			
2.1.3.3.2	Belanja Modal			
4.1.3.3.4				
	Pengadaan alat			
	angkutan darat			
0.4.0.5.5	bermotor roda 4			
2.1.3.3.3	Belanja Modal			
	Pengadaan gerobak			
	Dst			
2.1.3.4	Belanja Modal			
	Pengadaan Alat			
	Bengkel			
2.1.3.4.1	Belanja modal			
	pengadaan mesin las			
2.1.3.4.2	Belanja modal			
4.1.0.1.4	pengadaan mesin			
0.1.2.4.2	bubut Palania madal			
2.1.3.4.3	Belanja modal pengadaan Kompresor			
		ĺ	i i	i

	I.B.		<u> </u>
	Dst		
2.1.3.5	Belanja Modal		
	Pengadaan Peralatan		
	Kantor		
2.1.3.5.1	Belanja modal		
	pengadaan mesin tik		
2.1.3.5.2	Belanja modal		
	pengadaan mesin		
	hitung		
2.1.3.5.3	Belanja modal		
	pengadaan mesin		
	fotokopi		
2.1.3.5.4	Belanja modal		
	pengadaan mesin		
	Stensil		
	Dst		
2.1.3.6	Belanja Modal		
	Pengadaan		
	Perlengkapan Kantor		
2.1.3.6.1	Belanja modal		
	pengadaan meja		
	gambar		
2.1.3.6.2	Belanja modal		
	pengadaan almari		
2.1.3.6.3	Belanja modal		
	pengadaan Brankas		
2.1.3.6.4	Belanja modal		
	pengadaan Filing		
	kabinet		
2.1.3.6.5	Belanja modal		
	pengadaan white		
	board/papan tulis		
2.1.3.6.6	Belanja modal		
	pengadaan penunjuk		
	waktu/jam		
2.1.3.6.7	Belanja modal		
	pengadaan meja kursi		
	kerja		
2.1.3.6.8	Belanja modal		
	pengadaan meja kursi		
	rapat		
2.1.3.6.9	Belanja modal		
-	pengadaan meja kursi		
	tamu		
2.1.3.6.10	Belanja modal		
	pengadaan penghias		
	ruangan		
	Dst		
2.1.3.7	Belanja Modal		
	Pengadaan Komputer		
	dan perlengkapan		
	F G F		
	1		I

	T=	Т	T	1
2.1.3.7.1	Belanja modal			
	pengadaan Komputer			
2.1.3.7.2	Belanja modal			
	pengadaan laptop/note			
	book			
2.1.3.7.2	Belanja modal			
	pengadaan printer			
2.1.3.7.3	Belanja modal			
	pengadaan scaner			
2.1.3.7.4	Belanja modal			
	pengadaan Monitor			
2.1.3.7.5	Belanja modal			
	pengadaan CPU			
2.1.3.7.6	Belanja modal			
	pengadaan Stabiliser			
2.1.3.7.7	Belanja modal			
	pengadaan			
	kelengkapan komputer			
	(flashdisk, mouse, key			
	board, speaker, dll)			
2.1.3.7.8	Belanja modal			
	pengadaan peralatan			
	jaringan komputer			
	Dst			
2.1.3.8	Belanja Modal			
	Pengadaan Peralatan			
	Dapur			
2.1.3.8.1	Belanja modal			
	pengadaan tabung			
0.1.0.0	gas/gas			
2.1.3.8.2	Belanja modal			
0.1.0.0.0	pengadaan kompor gas			
2.1.3.8.3	Belanja modal			
	pengadaan rak			
0.1.2.0.4	piring/gelas			
2.1.3.8.4	Belanja modal			
	pengadaan piring/			
	gelas/sendok/ pisau/dll			
	Dst			
	1000			
2.1.3.9	Belanja Modal			
4.1.0.9	Pengadaan Peralatan			
	Dokumentasi			
2.1.3.9.1	Belanja modal			
	pengadaan kamera			
	Dst			
2.1.3.10	Belanja Modal			
	Pengadaan Peralatan			
	I CIIEUUUUII I CIU	İ	1	1
	komunikasi			
2.1.3.10.1	komunikasi			
2.1.3.10.1	komunikasi Belanja modal			
2.1.3.10.1	komunikasi			

0.1.0.10.0	D 1 ' 1 1		
2.1.3.10.2	Belanja modal		
	pengadaan faksimil		
	Dst		
2.1.3.11	Belanja Modal		
	Pengadaan		
	Kontruksi/Pembelian		
	Bangunan		
2.1.3.11.1	Belanja Modal		
	Pengadaan Kontruksi/		
	Pembelian gedung		
	Dst		
2.1.3.12	Belanja Modal		
2.1.3.12	Pengadaan Hewan		
	Ternak dan Tanaman		
2.1.3.12.1			
2.1.3.12.1	Belanja Modal		
	Pengadaan Hewan		
0.1.0.10.0	Ternak		
2.1.3.12.2	Belanja Modal		
	Pengadaan Tanaman		
	Dst		
2.1.3.13	Belanja Modal		
	Pengadaan Alat		
	Keamanan		
2.1.3.13.1	Belanja Modal		
	Pengadaan Alarm/		
	sirine		
2.1.3.13.2	Belanja Modal		
	Pengadaan senter		
	Dst		
2.2	BELANJA TIDAK		
	LANGSUNG		
2.2.1	Belanja Pegawai		
2.2.1.1	Penghasilan Tetap		
2.2.1.1	Kepala Desa dan		
	Perangkat Desa		
2.2.1.2			
4.4.1.4	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan		
	_		
0.0.1.0	Perangkat Desa		
2.2.1.3	Uang kehormatan BPD		
2.2.1.4	Penghasilan Pokok		
	Aparat Pemerintah		
	Desa Karangkopek		
2.2.1.5	Onderstand Perangkat		
	Desa Karangkopek		
	<u> </u>	I	
2.2.1.6	Jaminan Hari Tua		
2.2.1.6	<u> </u>		
2.2.1.6	Jaminan Hari Tua		
2.2.1.6	Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek		
	Jaminan Hari Tua Aparat Desa		

		1	<u> </u>	
2.2.1.10	Uang Penghargaan			
	Purna Tugas Kepala			
	Desa dan Perangkat			
	Desa Lainnya			
2.2.1.11	Uang Santunan			
	Kecelakaan/kematian			
2.2.1.12	Uang Santunan Duka			
2.2.1.13	Honor Bendahara Desa			
	Dst			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Belanja subsidi			
	produksi Usaha Desa			
2.2.2.2	Dst			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Belanja hibah kepada			
	usaha kelompok			
	masyarakat			
2.2.3.2	Belanja hibah kepada			
	kelompok kegiatan			
	ekonomi produktif			
	Dst			
	250			
2.2.4	Belanja Bantuan			
	Sosial			
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial			
	Pendidikan Anak Usia			
	Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Belanja bantuan sosial			
	panti asuhan			
2.2.4.3	Belanja hadiah			
2.2	Dst			
	200			
2.2.5	Belanja Bantuan			
	Keuangan			
2.2.5.1	Belanja bantuan			
2.2.0.1	keuangan kepada			
	Pedukuhan			
2.2.5.2	Belanja Bantuan			
2.2.0.2	Keuangan kepada			
	LPMD			
2.2.5.3	Belanja Bantuan			
4.4.0.0	Keuangan kepada			
	RT/RW			
2.2.5.4	Belanja Bantuan			
4.4.5.7	Keuangan kepada PKK			
2.2.5.5	Belanja Bantuan			
4.4.0.0	Keuangan kepada			
	Karang Taruna			
2.2.5.6				-
4.4.5.0	Belanja Bantuan			
	Keuangan kepada			
2.2.5.7	Satgas Linmas Belanja Bantuan Keuangan			
4.4.5.1	kepada posyandu			
	I nepada posyanda	1	_j	L

		1	
2.2.5.8	Belanja Bantuan		
1	Keuangan		
	penyelenggaraan		
	pemilihan Kepala Desa		
2.2.5.9	Belanja Bantuan		
	Keuangan pengisian		
	perangkat desa lainnya		
2.2.5.10	Belanja Bantuan		
2.2.0.10	Keuangan		
	pembentukan BPD		
	Dst		
2.2.6	Belanja tak terduga		
2.2.6.1	Pemakaman mayat tak		
	dikenal		
2.2.6.2	Bencana alam		
	Dst		
J	UMLAH BELANJA		
•			
_	I		
CIIE	DITIC/CII DA TATITIN		
	PLUS(SILPA TAHUN		
	RJALAN)/DEFISIT		
	dapatan + Penerimaan		
Pembiaya	an) - (Belanja + Pengeluaran		
	Pembiayaan))		
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan		
	Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan		
	Anggaran (SILPA) tahun		
	sebelumnya.		
3.1.2	Hasil penjualan		
J. 1.4	kekayaan Desa yang		
	dipisahkan. (tanah kas		
	i uipisaiikaii. Italiali kas		
2 1 2	desa)		
3.1.3	desa) Hasil penjualan		
3.1.3	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang		
	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.		
3.1.3	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang		
3.1.4	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.		
	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.		
3.1.4	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman		
3.1.4	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran		
3.1.4 3.2	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana		
3.1.4 3.2	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan		
3.1.4 3.2	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana		
3.1.4 3.2	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana		
3.1.4 3.2	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana		
3.1.4 3.2	desa) Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana		

3.2.2	Penyertaan Modal Desa Pembayaran utang		
JUMLAH PEMBIAYAAN			

, tanggal KEPALA DESA

Wates, 13 Januari 2012 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd

HASTO WARDOYO

PARAF KOORDINASI